

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban manusia. Pendidikan adalah salah satu hak asasi tiap manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Tarsidi:2007). Dalam cakupan internasional misalnya, terdapat beberapa instrumen internasional yang relevan dengan pernyataan tersebut, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak pada 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien pada 1990, dan Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus pada 1994. Adapun dalam cakupan nasional, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan hal tersebut. Secara tersurat, pernyataan ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dunia—termasuk Indonesia tengah mengalami masa di mana pendidikan lebih diutamakan. Pemerintah Indonesia, sebagai contoh, telah mengeluarkan dana 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan kesadaran akan hak asasi atas pendidikan, berbagai kemajuan dan perubahan pandangan serta pengakuan terhadap eksistensi serta hak-hak asasi manusia

(*human being*) juga turut meningkat sehingga berdampak terhadap paradigma dalam pendidikan yang selama dianut. Sistem serta metode pendidikan konvensional pun mulai banyak beralih kepada yang lebih kontekstual.

Salah satu gebrakan lain dalam dunia pendidikan, yakni adanya sistem pendidikan baru yang bersifat inklusif. Isu tentang sistem pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan telah berkembang lebih dari satu dasawarsa. Banyak negara di dunia saat ini telah mengadopsi isu sekolah inklusif dan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan pengembangan pendidikan, terutama dalam rangka melihat respon dan relasi isu yang mengitari pendidikan inklusif, baik di tingkat siswa, guru, sekolah maupun orangtua. Sejak diperkenalkan melalui *Salamanca Statement* (UNESCO:1994) dan strategi global *United Nation* dalam pendidikan untuk semua (*education for all*), isu pendidikan inklusif terus menemukan beragam bentuk dan pendekatan yang masing-masing negara memiliki alasan tersendiri untuk mengimplementasikannya.

Sistem pendidikan yang selama ini dianut sebagian besar sekolah di Indonesia harus diakui masih bersifat eksklusif. Di mana akses terhadap sekolah dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Salah satunya bagi siswa yang memiliki keterbatasan atau sering disebut penyandang disabilitas, mesti mencari sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini disebutkan Baedowi (2009) sebagai sistem *traditional dualistic system* yang memisahkan anak-anak normal dengan yang berkebutuhan khusus (terutama yang memiliki disabilitas) dalam bersekolah.

Sapon-Shevin (O'Neil:1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Pendidikan yang selama ini segregatif, seperti adanya pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan luar biasa, dengan adanya pendidikan inklusif menjadi berubah. Pendidikan menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh siapapun dari kalangan manapun dalam sistem ini. Dalam hal ini, khususnya anak berkebutuhan khusus yang menyandang disabilitas yang biasanya hanya diterima di SLB, mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk setara bersekolah dengan anak-anak lainnya yang tidak berkebutuhan khusus.

Alasan-alasan utama di balik munculnya sistem pendidikan inklusif ini selain adanya sentimen tertentu pada penyandang disabilitas menyebabkan struktur masyarakat yang timpang dan tidak cukup dewasa dalam menerima keberagaman, juga ketersediaan SLB yang sedikit serta sulit dijangkau bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.

Tahun 2004 menjadi tahun penting dalam sejarah pendidikan inklusif Indonesia. Adanya Deklarasi Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Kota Bandung telah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan instruksi pengimplementasian pendidikan inklusif melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menunjuk sekolah-sekolah yang diujicobakan menjadi sekolah inklusif. Hal ini sejalan dengan penetapan Jawa Barat sebagai *pilot project* pendidikan inklusif di Indonesia.

Sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah uji coba ini merupakan sekolah umum yang biasanya menerima siswa yang tidak menyandang disabilitas. Dengan adanya kebijakan ini, sekolah-sekolah umum tersebut menghadapi tantangan tersendiri dalam mengubah kehidupan sekolahnya. Bagaimana sebuah sekolah umum diubah menjadi sekolah inklusif tentunya memerlukan banyak adaptasi, khususnya yang peneliti soroti dalam hal kondisi fisik sekolah.

Namun, fenomena banyaknya sekolah mengubah sistem pendidikannya menjadi inklusif menyisakan masalah yang klasik mengenai prasarana dan sarana yang kurang mengakomodasi penyandang disabilitas dalam mengaksesnya. Kecenderungan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini untuk mendahulukan terselenggarakannya kegiatan persekolahan yang inklusif dibandingkan kesiapan infrastruktur seperti prasarana dan sarana pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas tentunya cukup menghambat terselenggaranya program pendidikan inklusif yang hasilnya memuaskan. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya di SDN Gegerkalong Girang 2 Bandung pada tahun 2011 menunjukkan fenomena ini dengan jelas, bahwa ada kecenderungan memordukaan ketersediaan dan terpenuhinya standar prasarana dan sarana pendidikan di sekolah umum yang diubah menjadi sekolah inklusif, seperti tidak tersedianya ruang khusus pembinaan bagi penyandang disabilitas (bina motorik, bina persepsi bunyi dan irama, bina diri, bina gerak, ataupun ruang bina pribadi) serta jumlah siswa yang melebihi kapasitas ruangan.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan beberapa berita yang dipublikasi oleh Kompas dan Bataviase yang mengambil tajuk *Manajemen Sekolah Inklusif*

Masih Memble serta *Sekolah Inklusif Masih Minim Fasilitas*. Dikemukakan bahwa peralatan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus masih sangat kurang, misalnya buku dengan huruf Braille dan tangga yang dilengkapi *ramp*.

Padahal, seperti yang dikemukakan Ditjen PLB bahwa idealnya dalam pendidikan inklusif diperlukan adanya fleksibilitas, kreativitas, dan sensitivitas dari lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menyandang disabilitas (Ditjen PLB:2007). Prasarana dan sarana pendidikan yang setiap hari digunakan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan di sekolah tentunya membutuhkan penyesuaian khusus. Idealisme dalam konsep sudah semestinya menjadi idealisme dalam realisasi konsep. Studi lain yang dilakukan oleh Amatzia Weisel dan Orit Dror (2006) tentang pendidikan inklusif menemukan tingginya peran budaya sekolah (*school climate*) dan *self-efficacy* dari para guru dalam merealisasikan pendidikan inklusif. Riset yang dilaksanakan Israel ini merumuskan aspek-aspek yang berkaitan dengan *school climate* dan berkorelasi positif dengan pendidikan inklusif di antaranya adalah dukungan kepemimpinan (*supportive leadership*); kemandirian guru (*teacher's autonomy*); kebanggaan akan profesi guru (*prestige of the teaching profession*); renovasi fasilitas sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (*renovations*); kerjasama antar guru (*teacher's collaboration*); dan banyaknya beban kerja (*workload*). Hasil riset ini menunjukkan bahwa amat penting ketersediaan dan kualitas fasilitas yang sering disebut prasarana dan sarana pendidikan.

SMA Negeri 4 Bandung merupakan salah satu sekolah menengah tingkat atas *cluster* 1 dengan sertifikasi standar QMS ISO 9001:2008 yang termasuk

dalam daftar sekolah uji coba implementasi pendidikan inklusif yang diprogramkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2005. SMA Negeri 4 Bandung dan sebanyak 122 sekolah lainnya telah menjadi sekolah uji coba inklusif semenjak surat yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan instruksi (Baihaqi:2009).

Disiplin ilmu arsitektur yang sifatnya menaungi kehidupan dan penghidupan tentunya mesti mampu berkontribusi banyak dalam keberlangsungan kemajuan konsep pendidikan inklusif yang disebutkan Sue Stubb dalam bukunya *Inclusive Education* sebagai pendidikan impian.

Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana SMA Negeri 4 Bandung mampu memenuhi prasarana dan sarana pendidikan dalam menyongsong program uji coba sekolah inklusif. Dengan demikian, peneliti mengambil judul, “*Evaluasi Prasarana dan Sarana Pendidikan SMA Negeri 4 Bandung Menuju Sekolah Inklusif*”. Konsep pendidikan inklusif yang menekankan pada kesetaraan dalam mengakses pendidikan tentunya juga mesti dibarengi dengan konsep kesetaraan dalam akomodasi prasarana dan sarana belajar yang menjadi tempat menjalani pendidikan. Inilah sebab yang melatarbelakangi peneliti hendak melakukan penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Menurut Nana Sujana (1999: 99) tentang identifikasi masalah yaitu:

“identifikasi masalah menjelaskan aspek-aspek masalah yang biasa muncul dari tema atau judul yang dipilih, maka identifikasi masalah itu merupakan pengungkapan dari berbagai masalah yang akan timbul untuk diteliti lebih lanjut”

Merujuk dari definisi di atas, maka peneliti menemukan beberapa hal yang mendasari penelitian ini, yakni:

1. Sekolah umum yang diubah menjadi sekolah inklusif memiliki perbedaan-perbedaan prasarana dan sarana pendidikan yang cukup banyak dengan sekolah luar biasa yang biasanya menerima warga sekolah dengan disabilitas;
2. Adanya kecenderungan memorduakan pemenuhan standar prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan pendidikan, utamanya pendidikan inklusif;
3. Pendidikan Inklusif yang diujicobakan di SMA Negeri 4 Bandung sebagai sistem alternatif pembelajaran di sekolah memerlukan prasarana dan sarana pendidikan sebagai media pembelajaran yang akomodatif terhadap kebutuhan warga sekolah yang beragam.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghasilkan kejelasan masalah yang akan diteliti dan tidak terjadinya perluasan masalah suatu penelitian, perlu dibatasi ruang lingkup permasalahannya, karena rumusan permasalahan dapat mengembangkan pengertian yang luas serta menyangkut keterbatasan waktu, tenaga, dan kecakapan. Seperti yang dikemukakan Winarno Surakhmad (1990:3) bahwa:

“pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah, untuk menetapkan terlebih dahulu sesuatu yang diperlukan pemecahan dengan dibatasi oleh keadaan waktu, tenaga, kecakapan. Selain itu juga menghindari terlalu luasnya masalah yang akan dibahas”

Masalah peneliti batasi dalam bahasan evaluasi keterpenuhan standar minimum prasarana dan sarana pendidikan SMA Negeri 4 Bandung dalam menerapkan sistem sekolah inklusif, khususnya bagi dua jenis disabilitas fisik, yakni penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas daksa.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pokok permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan Arikunto (1998:43) bahwa:

“rumusan masalah adalah dasar dalam membuat hipotesis, di mana di dalamnya harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, masalah harus jelas dan padat dan biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan”

Maka masalah yang dapat dirumuskan peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana gambaran nyata/kondisi aktual prasarana dan sarana pendidikan SMA Negeri 4 Bandung?
2. Apakah prasarana dan sarana pendidikan SMA Negeri 4 Bandung memadai untuk sekolah bersistem inklusif?

1.5. Penjelasan Istilah dalam Judul

John W. Ben (Faisal, 1992: 65) mengemukakan bahwa:

“istilah-istilah yang memungkinkan salah tafsir perlu ditegaskan batasan-batasannya. Kerangka acuan penelitian di dalam masalah yang diteliti pada dasarnya dapat dilihat/tercermin dari definisi-definisi yang diterapkan dan digunakan”

Maka, peneliti berusaha menguraikan istilah yang terdapat dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Evaluasi dalam hal ini berarti suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijakan tertentu. Kriteria atau tolok ukur yang dipegang tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan itu dilaksanakan (Wakhidin:2009).

2. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah. Sebagai contoh bangunan sekolah beserta segala ruangan yang ada di dalamnya (kelas, jamban, laboratorium, taman, dll.), jalan menuju sekolah, lapangan, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah perlengkapan penunjang pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Misalnya meja, kursi, alat-alat pembelajaran, papan tulis, penghapus, dan sebagainya. (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 mengenai standar prasarana dan*

sarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 33 Tahun 2008 mengenai standar prasarana dan sarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB)

3. SMA Negeri 4 Bandung

SMA Negeri 4 Bandung adalah objek penelitian peneliti yang merupakan sekolah menengah tingkat atas *cluster* 1 dengan sertifikasi QMS ISO 9001:2008 yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu sekolah yang diujicobakan menerapkan sistem inklusif sejak 2005.

4. Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif adalah sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif, yakni seperti yang Staub dan Peck (1995) nyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Sementara itu, Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengadakan penilaian terhadap fasilitas dasar dan perlengkapan penunjang pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung dalam menerapkan sistem sekolah inklusif yang dapat melayani semua anak tanpa memandang kondisi dan latar belakang.

1.6. Tujuan Penelitian

Arikunto (2002:51) menyebutkan bahwa:

“tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi aktual SMA Negeri 4 Bandung ditinjau dari aspek prasarana dan sarana pendidikan;
2. Menilai keterpenuhan standar minimum prasarana dan sarana pendidikan SMA Negeri 4 Bandung dalam mengakomodasi sistem pendidikan inklusif yang akan dipakai.

1.7. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Organisasi penyelenggara SMA Negeri 4 Bandung agar senantiasa mempersiapkan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang sistem inklusif;
2. Sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif agar juga senantiasa membenahi prasarana dan sarana pendidikan yang belum memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan sekolah inklusif;
3. Pemerintah yang berkewajiban menyediakan layanan pendidikan untuk semua agar lebih menyediakan kesempatan belajar, utamanya persoalan prasarana dan sarana pendidikan, bagi siswa yang berkebutuhan khusus yang menyandang disabilitas dengan lebih profesional.